



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 30 bulan September tahun 2021;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

dan

**BUPATI KARANGANYAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Retribusi Daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Tahun Anggaran 2022 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2022.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.126.535.040.500,00 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.109.035.040.500,00
b. Belanja Daerah	Rp2.126.535.040.500,00
Defisit/Surplus	(Rp17.500.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1) Penerimaan	Rp50.000.000.000,00
2) Pengeluaran	Rp32.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp17.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp0,00

### Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp2.109.035.040.500,00 (dua triliun seratus sembilan miliar tiga puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp377.807.947.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp174.850.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.310.944.000,00 (tujuh miliar tiga ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.973.814.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp181.673.189.500,00 (seratus delapan puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.723.627.093.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.591.093.899.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.533.194.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.126.535.040.500,00 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.594.697.994.593,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.009.537.548.776,00 (satu triliun sembilan miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp505.852.954.897,00 (lima ratus lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp68.654.940.920,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.652.550.000,00 (enam miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 180.806.187.507,00 (seratus delapan puluh miliar delapan ratus enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah.
  - b. belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. belanja modal gedung dan bangunan.
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.



- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.835.856.500,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.457.327.057,00 (lima puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.433.509.000,00 (tujuh puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.086.714.000,00 (tiga puluh empat miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.992.780.950,00 (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp336.030.858.400,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar tiga puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.495.661.000,00 (delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp317.535.197.400 (tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp17.500.000.000 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah; dan

- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal Daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian Pinjaman Daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.500.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

- c. lampiran III : Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain
- n. lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multiyears*);
- o. lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 10 Desember 2021  
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 15 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (8-321/2021)



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum  
SETDA  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19780311 199903 1 009



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

KABUPATEN KARANGANYAR  
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,  
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	377.807.947.500
4.1.01	Pajak Daerah	174.850.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	7.310.944.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.973.814.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	181.673.189.500
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.723.627.093.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.591.093.899.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	132.533.194.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.600.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	7.600.000.000
	Jumlah Pendapatan	2.109.035.040.500
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.594.697.994.593
5.1.01	Belanja Pegawai	1.009.537.548.776
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	505.852.954.897
5.1.03	Belanja Bunga	4.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	68.654.940.920
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.652.550.000
5.2	BELANJA MODAL	180.806.187.507
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.835.856.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.457.327.057
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.433.509.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.086.714.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.992.780.950
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	336.030.858.400
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.495.661.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	317.535.197.400
	Jumlah Belanja	2.126.535.040.500
	Total Surplus/(Defisit)	(17.500.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000



**Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021**

**KABUPATEN KARANGANYAR  
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,  
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	32.500.000.000
6.2.02	<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	4.000.000.000
6.2.03	<b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>	28.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	32.500.000.000
	Pembiayaan Netto	17.500.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0



**Bupati Karanganyar**

**T.T.D**

**JULIYATMONO**

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	168.120.235.500	1.117.485.305.668	157.566.646.332	0	0	1.275.051.952.000
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	702.735.348.700	33.328.316.300	0	0	736.063.665.000
1 01	1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	702.735.348.700	33.328.316.300	0	0	736.063.665.000
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	168.110.235.500	327.299.271.968	59.532.562.032	0	0	386.831.834.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	168.110.235.500	159.693.595.723	36.624.619.777	0	0	196.318.215.500
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD	0	108.252.153.000	19.947.847.000	0	0	128.200.000.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Tasikmadu	0	2.898.510.000	180.000.000	0	0	3.078.510.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Jaten I	0	2.472.357.000	80.435.000	0	0	2.552.792.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Jaten II	0	2.095.595.750	29.333.250	0	0	2.124.929.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Kebakkramat I	0	3.501.261.920	292.947.080	0	0	3.794.209.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kebakkramat II	0	2.118.595.500	69.792.500	0	0	2.188.388.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Mojogedang I	0	3.323.164.500	258.112.500	0	0	3.581.277.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Mojogedang II	0	2.163.992.000	25.000.000	0	0	2.188.992.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Karangpandan	0	3.185.327.000	194.107.000	0	0	3.379.434.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Matesih	0	2.839.970.000	65.000.000	0	0	2.904.970.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Tawangmangu	0	2.784.751.000	41.000.000	0	0	2.825.751.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Ngargoyoso	0	2.675.564.075	220.231.925	0	0	2.895.796.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Jenawi	0	2.726.897.000	200.000.000	0	0	2.926.897.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Kerjo	0	3.765.761.000	78.980.000	0	0	3.844.741.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Colomadu I	0	2.258.639.000	25.678.000	0	0	2.284.317.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Colomadu II	0	1.997.875.000	133.821.500	0	0	2.131.696.500
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Gondangrejo	0	3.389.701.000	87.325.000	0	0	3.477.026.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Jumapolo	0	2.782.217.500	330.856.500	0	0	3.113.074.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Jatipuro	0	2.684.610.000	100.000.000	0	0	2.784.610.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Jatiyoso	0	3.058.843.000	240.000.000	0	0	3.298.843.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0021 Puskesmas Jumanfono	0	3.429.899.000	157.475.000	0	0	3.587.374.000
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0022 Puskesmas Karanganyar	0	3.199.992.000	150.000.000	0	0	3.349.992.000

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja				Jumlah Belanja
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	12.742.309.120	55.000.000	0	0	12.797.309.120
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	12.742.309.120	55.000.000	0	0	12.797.309.120
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	12.742.309.120	55.000.000	0	0	12.797.309.120
<b>TOTAL</b>		<b>2.109.035.040.500</b>	<b>1.594.697.994.593</b>	<b>180.806.187.507</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>336.030.858.400</b>	<b>2.126.535.040.500</b>



Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO

**Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021**

**KABUPATEN KARANGANYAR  
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN  
PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening								Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
								Jumlah Pendapatan	0	
0	00	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	5		<b>BELANJA</b>		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>	736.063.665.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	0.00	00			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	158.520.108.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	00			<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	80.035.253.700	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02			Penambahan Ruang Kelas Baru	470.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1	BELANJA OPERASI	370.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	1 05	Belanja Hibah	370.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	2	BELANJA MODAL	100.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	420.755.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	2	BELANJA MODAL	420.755.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	370.755.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	439.520.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	5	2	BELANJA MODAL	439.520.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	5	2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	389.520.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.090.629.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	5	1	BELANJA OPERASI	30.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	5	1 05	Belanja Hibah	30.000.000	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	5	2	BELANJA MODAL	2.060.629.000	

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN**  
**PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)	Dasar Hukum
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.684.200	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	209.950.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1	BELANJA OPERASI	209.950.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	209.950.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	1.750.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5 1	BELANJA OPERASI	1.750.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	05	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.359.200	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1	BELANJA OPERASI	28.359.200	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	28.359.200	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	27.625.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1	BELANJA OPERASI	27.625.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	27.625.000	
Jumlah Belanja								12.797.309.120	
Total Surplus/(Defisit)								(12.797.309.120)	
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan								0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran								0	



Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Belanja				
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.117.485.305.668	157.566.646.332	0	0	1.275.051.952.000
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	702.735.348.700	33.328.316.300	0	0	736.063.665.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	702.735.348.700	33.328.316.300	0	0	736.063.665.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	577.082.557.000	451.000.000	0	0	577.533.557.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	772.703.500	0	0	0	772.703.500
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.000.000	0	0	0	130.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	317.169.500	0	0	0	317.169.500
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40.000.000	0	0	0	40.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	0	0	0	15.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	0	0	0	10.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	135.534.000	0	0	0	135.534.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	0	0	0	125.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	572.472.202.000	0	0	0	572.472.202.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	572.224.702.000	0	0	0	572.224.702.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.000.000	0	0	0	120.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	0	0	0	40.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000	0	0	0	7.500.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80.000.000	0	0	0	80.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	147.500.000	0	0	0	147.500.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000	0	0	0	7.500.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	110.000.000	0	0	0	110.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.500.000	0	0	0	17.500.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.500.000	0	0	0	12.500.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	379.651.500	0	0	0	379.651.500
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	329.651.500	0	0	0	329.651.500
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	0	0	0	50.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.582.500.000	0	0	0	1.582.500.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	0	0	0	60.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000	0	0	0	100.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.000.000	0	0	0	190.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.000.000	0	0	0	105.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	270.000.000	0	0	0	270.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.000.000	0	0	0	34.000.000
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	540.000.000	0	0	0	540.000.000

KABUPATEN KARANGANYAR											
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022											
Kode				Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Belanja				
							Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	700.000.000	0	0	0	700.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	290.000.000	0	0	290.000.000	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	410.000.000	0	0	410.000.000	
<b>TOTAL</b>						<b>1.594.697.994.593</b>	<b>180.806.187.507</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>336.030.858.400</b>	<b>2.126.535.040.500</b>	



Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
01	PELAYANAN UMUM					
01 01 1 01	Pendidikan	577.082.557.000	451.000.000	0	0	577.533.557.000
01 02 1 02	Kesehatan	264.291.408.495	22.983.456.005	0	0	287.274.864.500
01 03 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.328.910.000	15.000.000	0	0	18.343.910.000
01 04 1 05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	8.762.683.800	84.436.000	0	0	8.847.119.800
01 05 1 06	Sosial	4.107.580.000	0	0	0	4.107.580.000
01 06 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.409.194.800	6.912.500	0	0	4.416.107.300
01 07 2 11	Lingkungan Hidup	8.103.336.300	91.430.700	0	0	8.194.767.000
01 08 2 12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.255.283.500	615.348.500	0	0	7.870.632.000
01 09 2 13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	16.893.807.000	97.435.000	0	0	16.991.242.000
01 10 2 14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	0	0	0
01 11 2 15	Perhubungan	7.455.768.250	143.475.000	0	0	7.599.243.250
01 12 2 16	Komunikasi dan Informatika	4.969.242.000	76.500.000	0	0	5.045.742.000
01 13 2 17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	125.400.000	102.700.000	0	0	228.100.000
01 14 2 18	Penanaman Modal	6.211.112.282	1.039.997.500	0	0	7.251.109.782
01 15 2 20	Statistik	62.200.000	0	0	0	62.200.000
01 16 2 23	Perpustakaan	4.546.448.300	199.262.500	0	0	4.745.710.800
01 17 2 24	Kearsipan	274.863.200	35.200.000	0	0	310.063.200



Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	
10 01 1 01	Pendidikan	125.652.791.700	32.877.316.300	0	0	158.530.108.000
10 02 2 19	Kepemudaan dan Olahraga	6.641.860.000	0	0	0	6.641.860.000
10 03 2 22	Kebudayaan	2.185.000.000	0	0	0	2.185.000.000
10 04 2 23	Perpustakaan	254.147.875	388.727.125	0	0	642.875.000
11	PERLINDUNGAN SOSIAL					
11 01 1 06	Sosial	3.669.908.500	268.000	0	0	3.670.176.500
11 02 2 08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	284.400.000	0	0	0	284.400.000
11 03 3 32	Transmigrasi	29.256.000	0	0	0	29.256.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.594.697.994.593</b>	<b>180.806.187.507</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>336.030.858.400</b>	<b>2.126.535.040.500</b>



**Bupati Karanganyar**

**T.T.D**

**JULIYATMONO**

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

KABUPATEN KARANGANYAR  
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM  
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	<b>A SPM Bidang Pendidikan</b>			
	<b>Pendidikan Dasar</b>			
		<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>		
			<b>Penambahan Ruang Kelas Baru</b>	<b>470.000.000</b>
			<b>Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah</b>	<b>420.755.000</b>
			<b>Pembangunan Perpustakaan Sekolah</b>	<b>439.520.000</b>
			<b>Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>	<b>2.090.629.000</b>
			<b>Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas</b>	<b>1.920.000.000</b>
			<b>Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah</b>	<b>376.716.000</b>
			<b>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</b>	<b>57.017.700.000</b>
			<b>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</b>	<b>5.402.000.000</b>
			<b>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</b>	<b>370.000.000</b>
			<b>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar</b>	<b>659.738.000</b>
			<b>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</b>	<b>190.000.000</b>
			<b>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>10.505.151.500</b>
			<b>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</b>	<b>173.044.200</b>
			<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>80.035.253.700</b>
			<b>Jumlah Pendidikan Dasar</b>	<b>80.035.253.700</b>
	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>			
		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		
			<b>Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>550.000.000</b>
			<b>Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>250.000.000</b>
			<b>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>35.000.000</b>
			<b>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>2.020.000.000</b>
			<b>Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>5.923.700.000</b>
			<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>8.778.700.000</b>

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

KABUPATEN KARANGANYAR  
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM  
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			<b>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</b>	<b>2.671.121.700</b>
	<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			<b>2.787.721.700</b>
	<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti</b>			<b>2.787.721.700</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>			
		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		
			<b>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</b>	<b>12.575.500</b>
	<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			<b>12.575.500</b>
	<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>			<b>12.575.500</b>
	<b>Jumlah SPM Bidang Sosial</b>			<b>2.800.297.200</b>



Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

KABUPATEN KARANGANYAR  
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode		Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0	1.275.051.952.000
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	0	736.063.665.000
1	01	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	577.533.557.000
1	01	02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0	158.520.108.000
1	01	05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0	10.000.000
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	0	386.831.834.000
1	02	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	287.274.864.500
1	02	02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0	94.302.403.750
1	02	03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	3.487.105.250
1	02	04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0	448.649.500
1	02	05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0	1.318.811.000
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	121.671.063.000
1	03	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	18.343.910.000
1	03	02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0	6.939.386.000
1	03	03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0	15.830.432.000
1	03	05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0	6.517.601.000
1	03	07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0	820.000.000
1	03	08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	0	32.850.000.000
1	03	10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0	39.779.774.000
1	03	11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0	95.000.000
1	03	12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0	494.960.000
1	04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	4.451.955.000

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

KABUPATEN KARANGANYAR  
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	6.912.402.300
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0	1.172.971.800
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0	272.583.400
7			UNSUR KEWILAYAHAN	0	79.503.264.226
7	01		KECAMATAN	0	79.503.264.226
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	55.468.340.456
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	178.539.350
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	16.734.024.850
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	2.381.941.270
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	1.007.980.500
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	3.729.437.800
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	12.797.309.120
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	12.797.309.120
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.907.539.900
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0	700.000.000
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0	1.803.569.220
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0	4.786.200.000
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0	900.000.000
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0	700.000.000

Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO



Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.0000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	720.426.552.000	737.230.505.000	738.248.665.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	719.076.552.000	735.258.665.000	736.063.665.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	719.076.552.000	735.258.665.000	736.063.665.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	589.012.746.500	576.012.353.500	577.533.557.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	356.500.000	382.500.000	772.703.500
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	115.000.000	115.000.000	130.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80.000.000	80.000.000	317.169.500
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.500.000	97.500.000	135.534.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	125.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	585.273.595.000	571.647.202.000	572.472.202.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	585.101.095.000	571.474.702.000	572.224.702.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.000.000	45.000.000	120.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40.000.000	40.000.000	40.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02 06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0	0
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	72.500.000	72.500.000	147.500.000

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADAR KPDDAN PPAS**  
**DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode					Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	276.700.000	290.000.000	290.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	408.260.000	410.000.000	410.000.000



**Bupati Karanganyar**

**T.T.D**

**JULIYATMONO**

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Rp	%
				Rp	Rp	Rp	Rp		
1		<b>Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>							
		<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>							
			Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	50.000.000	0	0	0	50.000.000	93
		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>							
			Kecamatan Jumantono	247.096.100	0	0	0	247.096.100	460
3		<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing</b>							
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>							
			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	20.000
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
			Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	15.000.000	0	0	0	15.000.000	300
5		<b>Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar</b>							
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>							
			Satuan Polisi Pamong Praja	7.999.800	0	0	0	7.999.800	40
			Dinas Perhubungan	525.000	112.475.000	0	0	113.000.000	565
			Badan Keuangan Daerah	60.000.000	0	0	0	60.000.000	300
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>							
			Badan Keuangan Daerah	16.414.200	0	0	0	16.414.200	82
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>							
			Badan Keuangan Daerah	26.351.000	0	0	0	26.351.000	132



Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten  
Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
			Kecamatan Jumantono	1.834.100	0	0	0	1.834.100	9
			Kecamatan Karanganyar	1.827.520.131	0	0	0	1.827.520.131	9.138
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>									
			Kecamatan Jumantono	17.738.100	0	0	0	17.738.100	89
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim								
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>									
			Satuan Polisi Pamong Praja	100.000.000	0	0	0	100.000.000	13
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik								
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>									
			Satuan Polisi Pamong Praja	24.950.000	0	0	0	24.950.000	125
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>									
			Dinas Perhubungan	7.750.000	0	0	0	7.750.000	39
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>									
			Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	302.000.000	0	0	0	302.000.000	1.510
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
			Kecamatan Jaten	1.958.352.000	0	0	0	1.958.352.000	9.792
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>									
			Kecamatan Kebakkramat	197.280.000	0	0	0	197.280.000	986

Bupati Karanganyar

T.T.D

JULIYATMONO



Lampiran X: Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar  
 Nomor : 8 Tahun 2021  
 Tanggal : 10 Desember 2021

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV e	-	-	-	-	2	-	2
Golongan IV d	-	-	-	-	6	-	6
Golongan IV c	-	20	-	-	56	-	76
Golongan IV b	-	7	29	1	930	2	969
Golongan IV a	-	-	81	137	1,355	30	1,603
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	-	27	110	138	2,349	32	2,656
Golongan III e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III d	-	-	25	261	576	188	1,050
Golongan III c	-	-	-	89	583	235	907
Golongan III b	-	-	-	8	1,134	268	1,410
Golongan III a	-	-	-	2	418	481	901
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	-	-	25	360	2,711	1,172	4,268
Golongan II e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II d	-	-	-	-	179	336	515
Golongan II c	-	-	-	-	140	450	590
Golongan II b	-	-	-	-	2	213	215
Golongan II a	-	-	-	-	1	127	128
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	-	-	-	-	322	1,126	1,448
Golongan I e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I d	-	-	-	-	-	53	53
Golongan I c	-	-	-	-	-	43	43
Golongan I b	-	-	-	-	-	18	18
Golongan I a	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	-	-	-	-	-	114	114
<b>TOTAL</b>	-	27	135	498	5,382	2,444	8,486



BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO

Lampiran XI: Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar  
 Nomor : 8 Tahun 2021  
 Tanggal : 10 Desember 2021

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan saldo akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	Pajak Penerangan jalan		5,741,853,717	68,753,904,312	68,580,309,382	5,915,448,647
2	Pajak Hiburan		72,838,190	1,334,494,630	1,209,087,476	198,245,344
3	Pajak Hotel		35,296,700	7,620,017,689	7,525,118,670	130,195,719
4	Pajak restoran dan RM		152,515,002	9,767,039,606	9,547,614,477	371,940,131
5	Pajak Parkir		18,750,000	486,671,500	460,383,300	45,038,200
6	Pajak Air Tanah		209,565,700	3,184,708,796	3,164,435,896	229,838,600
7	Pajak Mineral Bukan Logam		150,986,950	203,339,050	176,014,050	178,311,950
8	BPHTB		487,659,048	63,441,072,606	63,401,389,306	527,342,348
9	PBB P2		57,892,122,321	30,758,261,763	26,927,195,937	61,723,188,147
10	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		47,593,756	318,348,913	280,068,269	85,874,400
11	Piutang Retribusi Parkir Khusus		15,929,038	248,165,995	264,095,033	-
12	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi		8,158,485	-	-	8,158,485
13	Piutang Retribusi IMB		34,664,000	3,013,451,550	3,048,115,550	-
14	Piutang Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah		63,500,000	344,030,000	260,530,000	147,000,000
15	Piutang Denda Keterlambatan pekerjaan fisik		165,637,161	118,675,478	217,849,885	66,462,754
16	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya		100,000,000	100,000,000	200,000,000	-
17	Piutang bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD		42,446,216	-	42,446,216	-
18	Piutang Dana Alokasi Umum		5,552,070,000	-	5,552,070,000	-
19	Piutang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan 2012-2017		159,363,816	-	159,363,816	-
20	Piutang Dana bagi Hasil Sumber daya Alam Mineral Batu Bara 2015 dan 2017		639,803	-	639,800	3
21	Piutang Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam panas Bumi 2017 dan 2018		104,476,245	11,868,507	116,344,752	-
22	Piutang Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam migas		-	271,668,725	-	271,668,725

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan saldo akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
56	Piutang LUEP		1,155,850,000	-	-	1,155,850,000
57	Piutang Setwan		149,069,000	-	-	149,069,000
58	Piutang Cukai		709,911,333	-	36,000,000	673,911,333
59	Piutang Pasar		182,520,000	-	-	182,520,000
60	Piutang Tunda Jual		188,900,000	-	-	188,900,000
61	Piutang UMKM		1,245,895,000	-	51,625,000	1,194,270,000
62	Piutang Koperasi		712,850,000	-	23,000,000	689,850,000
63	Piutang Bagi Hasil Provinsi		7,330,967,049	-	7,330,967,049	-
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>92,920,231,947</b>	<b>289,358,273,113</b>	<b>285,280,766,876</b>	<b>96,997,738,184</b>



BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO

SALINAN

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar  
 Nomor : 8 Tahun 2021  
 Tanggal : 10 Desember 2021

KABUPATEN KARANGANYAR  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1		PT. BPD Bank Jateng	Perda No. 15/2019	Pemenuhan Modal dasar	46,013,000,000	46,000,000,000	-	46,000,000,000	13,000,000	4,939,056,000	-	46,000,000,000
2		PT. BPR Bank Daerah Karanganyar	Perda No. 6/2018	Pemenuhan Modal dasar	100,000,000,000	36,750,000,000	2,000,000,000	38,750,000,000	61,250,000,000	1,670,543,000	-	38,750,000,000
3		PUDAM Tirta Lawu	Perda No. 8/2018	Pemenuhan Modal dasar	75,000,000,000	61,450,500,000	-	61,450,500,000	13,549,500,000	874,380,000	-	61,450,500,000
4		PUD BPR Bank Karanganyar	Perda No. 7/2018	Pemenuhan Modal dasar	50,000,000,000	19,750,000,000	1,000,000,000	20,750,000,000	29,250,000,000	903,950,000	-	20,750,000,000
5		PT. BPR BKK Tasikmadu	Perda No. 3/2012	Pemenuhan Modal dasar	14,700,000,000	10,150,000,000	-	10,150,000,000	4,550,000,000	851,009,000	-	10,150,000,000
6		PT. BKK Jateng Karanganyar	Perda 19/2002	Pemenuhan Modal dasar	12,250,000,000	9,160,200,700	-	9,160,200,700	3,089,799,300	-	-	9,160,200,700
7		PD. Apotik Sukowati	Perda 18/2001	Pemenuhan Modal dasar	3,000,000,000	1,044,956,326	-	1,044,956,326	1,955,043,674	-	-	1,044,956,326
8		Kolam Renang				250,000,000	-	250,000,000	-	-	-	250,000,000
9		PUD. Aneka Usaha	Perda No. 16/2019	Pemenuhan Modal dasar	75,000,000,000	27,422,511,869	1,000,000,000	28,422,511,869	-	100,000,000	-	28,422,511,869
		JUMLAH			375,963,000,000	211,978,168,895	4,000,000,000	215,978,168,895	113,657,342,974	9,338,938,000	-	215,978,168,895



BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO

Lampiran XIII: Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor : 8 Tahun 2021

Tanggal : 10 Desember 2021

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DAFTAR PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama Aset	Saldo pada akhir tahun n-2 (Rp)	Penambahan tahun n-1 (Rp)	Pengurangan tahun n-1 (Rp)	Saldo pada akhir tahun n-1 (Rp)
1.3.1	Tanah	888,902,218,504.00	974,136,195,200.00	85,379,107,800.00	1,777,659,305,904.00
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	526,931,486,471.82	70,024,733,115.00	17,450,424,199.00	579,505,795,387.82
1.3.2.1	Alat Besar	17,824,483,073.00	1,243,249,700.00	277,025,000.00	18,790,707,773.00
1.3.2.2	Alat Angkutan	99,576,161,934.00	11,216,896,011.00	6,410,060,811.00	104,382,997,134.00
1.3.2.3	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2,748,160,889.00	197,596,000.00	65,340,000.00	2,880,416,889.00
1.3.2.4	Alat Pertanian	4,052,533,925.00	240,950,864.00	60,301,000.00	4,233,183,789.00
1.3.2.5	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	109,230,059,931.00	20,015,134,135.00	5,640,377,166.00	123,604,816,900.00
1.3.2.6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	28,139,667,112.00	4,520,077,080.00	914,796,330.00	31,744,947,862.00
1.3.2.7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	88,986,911,572.00	10,260,185,535.00	754,676,074.00	98,492,421,033.00
1.3.2.8	Alat Laboratorium	49,367,448,464.82	3,330,988,865.00	945,442,508.00	51,752,994,821.82
1.3.2.9	Alat Persenjataan	62,775,000.00	371,198,000.00	361,886,000.00	72,087,000.00
1.3.2.10	Komputer	101,253,937,409.00	17,806,096,864.00	1,812,351,310.00	117,247,682,963.00
1.3.2.11	Alat Eksplorasi	-	-	-	-
1.3.2.12	Alat Pengeboran	-	-	-	-
1.3.2.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	-	-	-	-
1.3.2.14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	2,989,155,074.00	193,113,000.00	13,904,000.00	3,168,364,074.00
1.3.2.16	Alat Peraga	-	-	-	-
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
1.3.2.18	Rambu - Rambu	20,655,172,879.00	576,738,111.00	194,264,000.00	21,037,646,990.00
1.3.2.19	Peralatan Olah Raga	2,045,019,209.00	52,508,950.00	-	2,097,528,159.00
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	1,093,175,881,182.00	102,504,339,771.00	68,087,309,838.00	1,127,592,911,115.00
1.3.3.1	Bangunan Gedung	1,074,527,876,185.00	89,226,128,671.00	54,809,098,738.00	1,108,944,906,118.00

No	Nama Aset	Saldo pada akhir tahun n-2 (Rp)	Penambahan tahun n-1 (Rp)	Pengurangan tahun n-1 (Rp)	Saldo pada akhir tahun n-1 (Rp)
1.3.3.2	Monumen	14,659,121,997.00	10,558,885,100.00	10,558,885,100.00	14,659,121,997.00
1.3.3.3	Bangunan Menara	186,675,000.00	-	-	186,675,000.00
1.3.3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	3,802,208,000.00	2,719,326,000.00	2,719,326,000.00	3,802,208,000.00
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1,036,241,494,814.00	101,199,923,127.00	18,752,884,463.00	1,118,688,533,478.00
1.3.4.1	Jalan Dan Jembatan	860,937,877,535.00	86,384,809,762.00	12,941,132,145.00	934,381,555,152.00
1.3.4.2	Bangunan Air	148,986,208,782.00	13,638,437,999.00	4,666,653,622.00	157,957,993,159.00
1.3.4.3	Instalasi	9,505,039,252.00	345,690,546.00	345,690,546.00	9,505,039,252.00
1.3.4.4	Jaringan	16,812,369,245.00	830,984,820.00	799,408,150.00	16,843,945,915.00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	321,327,273,397.93	40,096,667,807.00	522,833,330.00	360,901,107,874.93
1.3.5.1	Bahan Perpustakaan	100,444,870,762.93	10,869,071,757.00	39,528,600.00	111,274,413,919.93
1.3.5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	5,239,853,087.00	1,271,558,500.00	19,950,000.00	6,491,461,587.00
1.3.5.3	Hewan	85,190,500.00	-	-	85,190,500.00
1.3.5.4	Biota Perairan	2,561,666.00	-	-	2,561,666.00
1.3.5.5	Tanaman	1,544,052,400.00	350,094,000.00	350,094,000.00	1,544,052,400.00
1.3.5.6	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	-
1.3.5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	214,010,744,982.00	27,605,943,550.00	113,260,730.00	241,503,427,802.00
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	19,553,172,165.00	6,874,578,415.00	10,159,535,865.00	16,268,214,715.00
	Jumlah Aset Tetap	3,886,131,526,534.76	1,294,836,437,435.00	200,352,095,495.00	4,980,615,868,474.76
	Jumlah Aset Tetap (Netto)	2,956,505,760,225.76	1,112,173,029,036.00	189,595,152,639.00	3,879,083,636,622.76



BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO

Lampiran XIV: Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

SALINAN

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN**  
**DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Kode	Judul Aktivitas Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi s/d akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun 2021 (Rp) TA n	
			APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.03.08.2.01.02	Pembangunan Masjid Agung Karanganyar	0	0	0	0	0
		<b>JUMLAH</b>	0	0	0	0	0



**BUPATI KARANGANYAR**

**T.T.D**

**JULIYATMONO**



Lampiran XV: Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

SALINAN

**KABUPATEN KARANGANYAR  
DAFTAR DANA CADANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2								
3								
dst								
	JUMLAH							



BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO

Lampiran XVI: Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar  
Nomor : 8 Tahun 2021  
Tanggal : 10 Desember 2021

SALINAN

KABUPATEN KARANGANYAR  
DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun 2021 (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BPD Bank Jateng	PP No. 56 Th. 2018 tentang Pinjaman Daerah	-	68,457,159,600	3 tahun	8,5%	Pembangunan Sarpras	20,000,000,000	2,792,264,950	28,457,159,600	1,021,620,494
	<b>JUMLAH</b>			<b>68,457,159,600</b>		<b>-</b>		<b>20,000,000,000</b>	<b>2,792,264,950</b>	<b>28,457,159,600</b>	<b>1,021,620,494</b>



BUPATI KARANGANYAR

T.T.D

JULIYATMONO